



## **P E N E T A P A N**

Nomor **209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Aman Jaya Negara Ratu RT 002 RW 003 Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon**;

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebon Karet, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Karang Rejo II Kecamatan Muara Sungkai kabupaten Lampung Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 01 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Pemohon dan Termohon atas kemauan dan tanpa ada nya paksaan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten' Lampung Utara, dan Tercatat

Hal. 1 dari 5 Hal.Penetapan No.209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/015/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa ketika menikah tersebut Pemohon Termohon mengaku berstatus Perawan dan Perjaka;
5. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, selama 1 hari Pemohon Mengetahui Bahwa Termohon memiliki ilmu yang mengandung Musrik atau Menyekutkan Allah berupa Susuk untuk bisa mencari kerja dan mencari wanita lain, karena alasan tersebut Pemohon akhirnya ingin membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena Termohon menyembunyikan ilmu yang mengandung ke sirikan atau Musrik;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela karena merasa sudah di bohongi;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara pada tanggal 22 Januari 2022 dan Tertanggal 24 Januari 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah 0015/015/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal.Penetapan No.209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Ktbn tanggal 02 Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak membatalkan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Kemudian Pemohon menyatakan kepada majelis hakim mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki posita permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki posita permohonannya;

*Hal. 3 dari 5 Hal.Penetapan No.209/Pdt.G/2022/PA.Ktbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonnannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 01 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal.Penetapan No.209/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Nadia Rufaidah, S.H.**

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fakta Saimigo, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp625.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal.Penetapan No.209/Pdt.G/2022/PA.Ktbn